

**ANALISIS DIPLOMASI PERTAHANAN NEGARA DALAM PANDANGAN
CHANAKYA (STUDI TEKS ARTHASHASTRA SEBAGAI DASAR STRATEGI
DIPLOMASI PERTAHANAN)**

**ANALYSIS OF STATE DEFENSE DIPLOMACY IN THE COURSE OF CHANAKYA
(LITERATURE STUDY OF ARTHASHASTRA AS THE BASIC STRATEGY FOR STATE
DEFENSE DIPLOMACY)**

Ni Nyoman Ayu Nikki Avalokitesvari¹, I Wayan Midhio², Triyoga Budi Prasetyo³

Program Studi Diplomasi Pertahanan Universitas Pertahanan

(ayunikkia@gmail.com)

Abstrak -- Diplomasi pertahanan merupakan kajian baru dalam ilmu HI, utamanya diplomasi. Hal ini membuat kajian-kajian yang berkembang dalam diplomasi pertahanan masih minim dan didominasi oleh konsep-konsep *western*. Padahal hal ini berpotensi menimbulkan bias teoretis jika diterapkan di negara-negara timur. Filsafat timur sesungguhnya memberikan banyak pilihan konsep terkait diplomasi dan ilmu pertahanan, seperti dalam Arthashastra karya Chanakya. Penelitian ini membahas mengenai analisa konsep diplomasi pertahanan negara dalam pandangan Chanakya melalui karyanya, Arthashastra. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep pemetaan ancaman, *statecraft* dan juga diplomasi dalam Arthashastra dapat menjadi dasar strategi dan paradigma dalam Diplomasi Pertahanan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai konsep pemetaan ancaman, *statecraft* dan diplomasi dalam Arthashastra sebagai dasar strategi dan paradigma dalam diplomasi pertahanan. Metode yang digunakan adalah analisa isi kualitatif menggunakan analisis wacana kritis dan hermeneutika Gadamer. Konsep Diplomasi pertahanan dalam Pandangan Chanakya digali dari beberapa teori besar dalam Arthashastra mengenai pemetaan ancaman (Teori *Mandala*); mengenai *statecraft* (Teori *Saptanga*); dan mengenai Diplomasi (Teori *Mantrashakti*, *Śāḍgunya* dan *catur upaya*). Pemetaan ancaman dalam teori *mandala* dipandang masih tradisional dan bersifat *military heavy*. Konsep *statecraft* dalam teori *saptangga* sebagian besar masih relevan, walau ada satu elemen yang perlu dimaknai kembali. Konsep diplomasi dalam teori *mantrashakti*, *Śāḍgunya* dan *catur upaya* sebagian besar masih relevan dan dapat dijadikan dasar dalam paradigma diplomasi pertahanan. Secara umum konsep diplomasi pertahanan chanakya memiliki banyak kemiripan dengan diplomasi militer, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam strategi diplomasi militer. Namun untuk bisa diaplikasikan pada diplomasi pertahanan saat ini diperlukan penyesuaian terutama mengenai keterlibatan elemen nir-militer.

¹ Mahasiswa Program Studi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan (Cohort 4).

² Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. I Wayan Midhio, M.Phil. adalah dosen tetap Universitas Pertahanan sekaligus pembimbing pertama penelitian.

³ Letnan Kolonel Inf. Dr Triyoga Budi Prasetyo, M.Si. adalah dosen tetap Universitas Pertahanan sekaligus pembimbing kedua penelitian.

Kata kunci: Diplomasia Pertahanan, Chanakya Arthashastra, Teori Mandala, Teori Saptanga, Mantrashakti, Śāḍḡuṇya, Catur Upaya.

Abstract – Defense diplomacy is a new study in International Relations science, mainly diplomacy. This makes studies that develop in defense diplomacy are still mildly and dominated by western concepts. Even though this has the potential to cause theoretical bias if applied in eastern countries. Eastern philosophy actually provides many choices of concepts related to diplomacy and defense science, such as in Chanakya's Arthashastra. This study discusses the analysis of state defense diplomacy concept in the course of Chanakya through his work, Arthashastra. The research questions in this study are how the concept of threat mapping, statecraft and diplomacy in the Arthashastra can be the basis of strategies and paradigms in Defense Diplomacy. This study aims to provide an overview of the concept of threat mapping, statecraft and diplomacy in Arthashastra as the basis of strategies and paradigms in defense diplomacy. The method used is qualitative content analysis using critical discourse analysis and Gadamer's hermeneutics. The concept of defense diplomacy in the course of Chanakya was explored from several major theories in the Arthashastra concerning the mapping of threats (Mandala Theory); regarding statecraft (Saptanga Theory); and the Diplomacy (Theory of Mantrashakti, Śāḍḡuṇya and catur upaya). Mapping threats in the mandala theory is seen as still traditional and military heavy. The concept of statecraft in the saptangga theory is still largely relevant, although there is one element that needs to be reinterpreted. The concept of diplomacy in the mantrashakti, Śāḍḡuṇya and catur upaya theory is still largely relevant and can be used as a basis in the defense diplomacy paradigm. In general, the concept of defense diplomacy has many similarities to military diplomacy, so that it can be used as a reference in military diplomacy strategies. However, to be applied to defense diplomacy, adjustments are currently needed, especially regarding the involvement of non-military elements.

Keywords: Defense Diplomacy, Chanakya Arthashastra, Mandala theory, Saptanga theory, Mantrashakti, Śāḍḡuṇya, Catur Upaya.

Pendahuluan

Diplomasia pertahanan merupakan sebuah rumpun ilmu baru yang berkembang dari ilmu pertahanan dan juga ilmu hubungan internasional. Sebagai sebuah ilmu baru, pemikiran-pemikiran western masih mendominasi perkembangan paradigma dan juga teori dalam ilmu diplomasia pertahanan.⁴ Hegemoni paradigma ini dapat menimbulkan bias teoretis jika diterapkan di negara dengan akar budaya timur, karena perbedaan nilai

budaya yang berkembang di masyarakatnya. Budaya timur telah menyediakan filsafat ilmu pertahanan yang membahas mengenai perang, damai, seni memerintah, seni berdiplomasi dan juga berstrategi. *The Art of War* dari Sun Tzu dan *Arthashastra* karya Kautilya atau yang sering juga disebut sebagai Chanakya, merupakan magnum opus Strategi Perang dan ilmu pemerintahan yang berakar dari budaya timur.

Arthashastra karya Chanakya merupakan risalah mengenai ilmu tata

⁴ Amitav Acharya, "Dialogue and Discovery: In Search of International Relations Theories Beyond the West", *Millennium: Journal of International Studies*, Volume 39, Nomor 3, May 2011, hlm. 619–637.

pemerintahan yang tidak hanya sebatas membahas administrasi kenegaraan, ekonomi dan hukum saja namun juga membahas mengenai perang, strategi menaklukkan musuh dari luar negara, seni diplomasi, dan juga intelejen. Meskipun secara internasional telah diakui sebagai salah satu buku yang memberikan konsep terkait diplomasi dan juga pertahanan negara, namun sampai saat ini belum ada penstudi ilmu pertahanan maupun hubungan internasional di Indonesia yang membahas ataupun mengembangkan konsep-konsep dari Arthashastra.

Sistem pertahanan yang dianut di Indonesia sesungguhnya unik. Merupakan perpaduan antara konsep-konsep western dan juga filosofi Jawa kuno. Keberadaan filosofi Jawa Kuno dan penggunaan semboyan berbahasa sansekerta dalam doktrin militer di Indonesia membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai kemungkinan penggunaan nilai-nilai yang berasal dari pustaka India Kuno, seperti Arthashastra untuk dijadikan dasar paradigma dalam strategi diplomasi pertahanan.

Konvensi Montevideo tahun 1993 menyatakan bahwa sebuah negara harus memiliki empat unsur utama. Yakni

penduduk tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang berdaulat serta kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain.⁵ Dengan demikian sistem pertahanan negara yang baik adalah sistem yang mampu melindungi penduduk dan wilayah kedaulatannya dari ancaman; memiliki pemerintahan yang berdaulat serta tata pemerintahan/*statecraft* yang baik; serta kemampuan berhubungan dan atau berdiplomasi dengan negara lain.

Dengan demikian, peneliti memandang untuk dapat merumuskan konsep diplomasi pertahanan negara dari pandangan Chanakya dalam bukunya Arthashastra, diperlukan beberapa konsep dasar yang memenuhi empat unsur negara. Unsur pemerintahan berdaulat melalui konsep *statecraft*; unsur kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain dengan konsep diplomasi; sementara untuk memelihara penduduk serta wilayah negara adalah konsep pemetaan ancaman.

Berdasarkan kajian permasalahan tersebut Penulis tertarik untuk mengambil penelitian berjudul “Analisa Diplomasi Pertahanan Negara dalam Pandangan Chanakya Arthashastra, Studi Teks

⁵ Pasal 1 Konvensi Montevideo dalam Lazarusli, Budi dan Syahmin A.K. 1986. *Suksesi Negara*

dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Internasional. Bandung: Remaja Karya. Hlm. 7

Arthashastra Sebagai Dasar Strategi Diplomasi Pertahanan Negara”.

Metode Penelitian

Secara umum desain penelitian ini adalah penelitian analisis isi (*content analysis*) dengan metode kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian teks dan mengkaji nilai-nilai serta gagasan mengenai ancaman, statecraft, dan diplomasi yang terdapat dalam teks Arthashastra. Untuk kemudian disarikan sebagai sebuah konsep diplomasi pertahanan berdasarkan pandangan Chanakya. Peneliti juga berupaya melihat konteks diplomasi pertahanan yang di jalankan oleh Indonesia (kemhan dan kemlu).

Penelitian dilaksanakan di beberapa tempat yakni, Bali, Kementerian Pertahanan (Dirkorsin Ditjen Strahan Kemhan RI) dan Kementerian Luar Negeri (Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kemlu RI). Penelitian dilaksanakan dari bulan September hingga November 2018. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah Studi literature dan wawancara mendalam dengan teknik penentuan narasumber berupa purposive snowball sampling. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan metode triangulasi data, sumber dan teori.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) sering pula disebut sebagai *Ethnographic Content Analysis* (ECA) yaitu, perpaduan analisis isi objektif dengan observasi partisipan. Dalam menganalisis teks Arthashastra (konsep pemetaan ancaman, statecraft dan diplomasi) peneliti juga menggunakan analisis wacana dari Teun Van Dijk. Analisis ini dipilih karena analisis ini memiliki dimensi wacana berupa teks, kognisi sosial serta konteks sosial. Dengan demikian, peneliti dapat menghasilkan konsep diplomasi pertahanan menurut pandangan Chanakya, yang kemudian dapat ditarik benang merah mengenai nilai-nilai tersebut sebagai dasar strategi dalam diplomasi pertahanan.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran tentang Pustaka Arthashastra

Secara garis besar Arthashastra merupakan sebuah kompendium, sebuah risalah mengenai tata pemerintahan sebuah negara. Chanakya atau Kautilya sebagai penulis risalah ini merupakan seorang perdana menteri sekaligus penasihat politik utama Raja Chandragupta dan anaknya, Bindusara di Kerajaan Maurya. Arthashastra disusun oleh Chanakya berdasarkan sejumlah buku

politik Hindu kuno, tradisi politik, dan pengalaman hidupnya. Arthashastra karya Chanakya terdiri dari 32 bagian, 15 adikarana (buku) dengan 150 bab, 180 *Prakarana* (bagian yang ditujukan untuk topik tertentu) dan 6000 sloka.⁶

Naskah Arthashastra disusun sekitar 300 tahun SM. Naskah ini memuat doktrin kebijakan luar negeri yang berhubungan dengan keinginan raja ambisius untuk menjadi penakluk/penguasa dataran India.⁷ Arthashastra disusun oleh Chanakya dengan latarbelakang sistem internasional yang anarki, tanpa adanya supremasi yang lebih tinggi dari negara. Keadaan ini diperparah dengan ketiadaan kesepakatan bersama mengenai penghormatan atas kedaulatan dan batas-batas suatu negara, selayaknya yang berkembang pada masa modern saat ini. Pada masa dinasti Candragupta, sistem yang ada mengembangkan apa yang disebut sebagai pandangan realisme, yang mengedepankan *self-help*, upaya negara untuk terus mengakumulasi power agar *sustainability* negara tetap terjaga. Pandangan yang berkembang antar

negara adalah pilihan hanya ada dua, antara menaklukkan atau ditaklukkan. Pengembangan power atau growth negara bisa terjadi ketika negara berhasil mengakuisisi wilayah kerajaan tetangganya atau kerajaan lainnya. Karena dengan akuisisi ini kerajaan mendapat tidak hanya penambahan wilayah, namun juga perbendaharaan yang diperoleh melalui upeti dari raja yang telah dikalahkan, dan juga sumber daya alam yang terdapat pada kerajaan yang telah ditaklukkan tersebut.⁸

Pemetaan Ancaman dalam Pandangan Chanakya Arthashastra

Chanakya membahas mengenai ancaman pada adhikarana kedelapan. Chanakya merujuk bencana atau ancaman dengan terminologi *vyasana*. Bencana atau ancaman ini sumbernya bisa dari dalam negeri ataupun luar negeri. Ancaman dari dalam negeri termasuk di dalamnya adalah pemberontakan, kelaparan, wabah penyakit, epidemi, perselisihan internal, dekadensi penguasa, pedagang/ pejabat yang tidak jujur (korup), masalah

⁶ L.N.. Rangarajan. *The Arthashastra: Edited, Rearranged, Translated and Introduced*. New Delhi, India: Penguin Books India Ltd. 1992 hlm. 10

⁷ Satish Karad, "Perspective of Kautilya's Foreign Policy: An Ideal of State Affairs", *Modern*

Research Studies. Volume 2. Nomor 2, June 2015. Hlm. 322-332

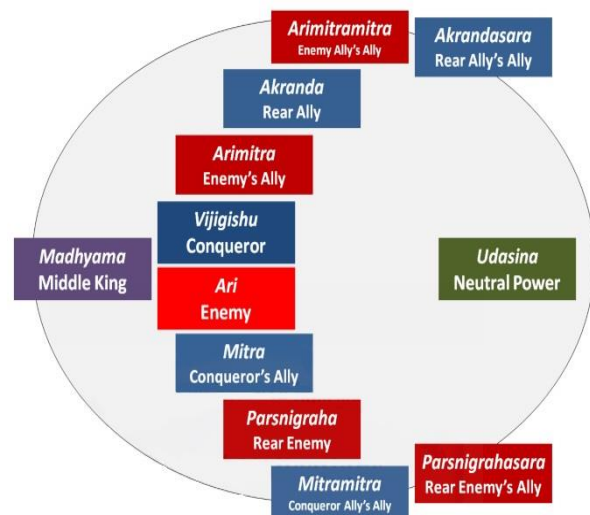
⁸ Vinay Vittal, "Kautilya's Arthashastra: A Timeless Grand Strategy", *Tesis Magister*, (Alabama: School of Advanced Air and Space Studies Maxwell Airforce Base) 2011, hlm. 11

perekonomian, penghianatan yang dilakukan oleh petinggi negara (menteri/pejabat tinggi negara), paceklik/kekeringan, kelaparan, bencana alam (banjir, kebakaran hutan), dan kejahatan domestik (perampokan, pencurian). Sedangkan bencana dari luar negara dapat berupa upaya musuh untuk menaklukkan/menginvasi sang vijigīṣu / negara, sekutu yang membelot, dan infiltrasi agen dari negara asing ke dalam negeri.

Dalam pandangan Chanakya, ancaman secara eksternal yang paling potensial adalah dari negara yang berbatasan langsung dengan negaranya. Pemetaan ancaman utamanya ancaman dari luar negara dijabarkan dalam teori Mandala. Posisi geografis dari sebuah negara yang berdekatan/berbatasan langsung dikategorikan sebagai musuh alami dan paling potensial. Kemudian setiap negara yang beraliansi dengan negara tetangga tersebut juga akan dikategorikan sebagai musuh.⁹ Di lain pihak, musuh dari negara tetangga tersebut selayaknya diajak bekerjasama karena dikategorikan sebagai kawan.

Teori Mandala ini menyertakan setidaknya 12 kategori negara dalam

lingkaran negara/ *circle of a state*. Ilustrasi dari teori mandala dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1 Ilustrasi Teori Mandala

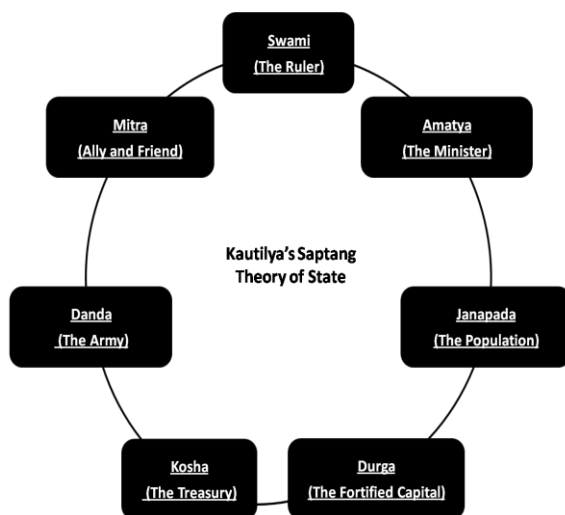
Sumber: Vittal, 2011

Ilustrasi di atas merupakan bentuk simbolis semata, di mana dalam keadaan nyata sangat memungkinkan terbentuknya mandala yang saling tumpang tindih, tergantung pada konstelasi arah kerjasama ataupun analisa lingkungan strategis dalam percaturan politik regional maupun global. Konstelasi geografis ini bersifat dinamis, di mana negara tetangga bisa saja bermusuhan, ramah atau bersifat hubungan vasal (negara bawahan).

⁹ RP Kangle, *The Arthashastra Part II* (Delhi: Motilal Banardisass, 1992), hlm 318. Adhikarana 6. Bab 2. Sutra 13

Konsep Tata Pemerintahan (statecraft) dalam Arthashastra

Saptanga Theory menggambarkan mengenai tujuh elemen yang membentuk sebuah negara. Negara dalam Arthashastra dianalogikan sebagai organisme yang berkembang dan *prakritis* adalah bagian tubuhnya¹⁰. Ilustrasi mengenai teori Saptanga dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2 Ilustrasi teori Saptanga

Sumber: <http://www.defencestudies.co>, 2017

Ketujuh elemen ini saling terhubung. Hirarki derajat kepentingan setiap elemen secara berurut dimulai dari *Swami* atau pemimpin negara; *Amatyā* atau pejabat legislatif negara; *Janapada* atau populasi dan wilayah; *Durga* atau kota yang dibentengi; *Kosha* atau perbendaharaan negara; *Danda* atau angkatan bersenjata,

kapabilitas militer negara, dan yang terakhir adalah *Mitra* atau sekutu.

Secara garis besar derajat kepentingan merujuk pada skala prioritas ketika terjadi ancaman terhadap elemen-elemen negara ini. Namun yang perlu di tekankan adalah Chanakya sendiri tidak menganjurkan negaranya untuk mengikuti hirarki ini secara membabi-buta. Analisis dan berbagai pertimbangan tetap menjadi dasar dalam menentukan derajat kepentingan. Ancaman terhadap salah satu elemen atau lebih tetap harus disikapi dengan hati-hati, penuh kewaspadaan sehingga tidak mengganggu stabilitas dan sustainabilitas negara

Chanakya menggambarkan ketujuh elemen pembentuk negara itu sebagai eksposisi dari teori Mandala (*circle of state*) yang kemudian membentuk dasar dari kebijakan luar negeri di lingkungan yang didominasi oleh ekspansionisme teritori atau penaklukan teritori. Ketujuh elemen ini kemudian secara tidak langsung juga menjadi pedoman ukuran mengenai kekuatan nasional yang komprehensif dari sebuah negara. Kualitas raja atau pemimpin menentukan apakah negara tersebut akan bisa memiliki power yang baik atau tidak.

¹⁰ Sukra, Sukraniti, (Mumbai: Khemraj Shrikrishnadass, 2012) chapter 1, sutra 62

Konsep *Saptanga* teori ini tidak hanya dipandang sebagai tujuh elemen yang harus dimiliki negara yang menginginkan kekuatan yang mumpuni bagi bangsanya. Dalam interpretasi yang lain Konsep *Saptanga* juga dimaknai sebagai *Elements of Sovereignty*.¹¹ Tujuh *prakritis* bersama-sama termanifestasi menjadi *Shakti* atau kekuatan bagi negara. *Arthashastra* mengidentifikasi tiga *shakti*: *Prabhava-shakti*, *Mantra-shakti* dan *Utsaha-shakti*. Ilustrasi mengenai tiga *shakti* dapat dilihat pada gambar 3 dibawah ini.



Gambar 3 Ilustrasi konsep *Tri Shakti*

Sumber : Mishra, 2017

Prabhava-shakti dimaknai sebagai kekuatan untuk menghasilkan "efek" yang menguntungkan negara yang berkaitan dengan ekonomi dan juga kekuatan militer suatu negara. Dengan demikian, dalam pendekatan ilmu Hubungan Internasional

saat ini, dapat diasosiasikan dengan konsep *hard power*. *Mantra-shakti* dimaknai sebagai kekuatan untuk mempengaruhi, memberi nasihat, dan mendorong negara lain untuk dikooptasi oleh sang *vijigīṣu*.

Konsep Diplomasi dalam Pandangan Chanakya Arthashastra

Diplomasi secara umum dalam *Arthashastra* karya Chanakya dibahas dengan terminologi *mantrashakti*. *Mantrashakti* merupakan kekuatan yang dibangun di atas kecerdasan dan kekuatan narasi manusia termasuk perkataan dan tulisan. *Mantrasahakti* dalam *Arthashastra* dikenal sebagai *soft power diplomacy*, yakni menasehati, mengarahkan, sesuatu melalui kekuatan lisan yang membuat seseorang ataupun sebuah negara bersedia melakukan sesuatu ataupun bersepakat akan suatu hal yang membawa dampak positif terhadap tujuan negara.

Terkait dengan aplikasi diplomasi pertahanan, Chanakya menjabarkannya dalam enam kebijakan politik luar negeri (*Ṣādgunya Theory*). Keenam kebijakan politik tersebut adalah membuat perdamaian (*saṃdhi*), melakukan

¹¹ Col. Harjeet Singh, *The Military Strategy of The Arthashastra*, (New Delhi: Pentagon Press, 2012) hlm 32

peperangan (*vigraha*), tinggal diam/netral (*asana*), mempersiapkan diri untuk perang atau siaga (*yana*), mencari dukungan atau aliansi (*samsraya*), dan kebijakan ganda (*dvaiddibhava*) yaitu membuat perdamaian dengan negara satu sementara itu juga mengadakan peperangan dengan negara lainnya.¹² *Śāḍgunya* atau *six fold Foreign Policy* merupakan kebijakan yang dapat diambil oleh penguasa negara dalam kerangka hubungan antar negara.

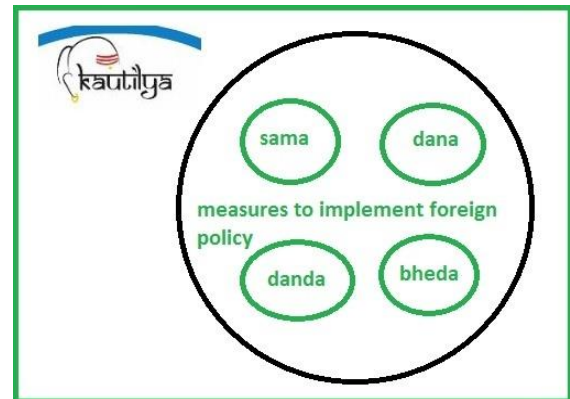
Ilustrasi *Śāḍgunya* dapat dilihat pada gambar dibawah ini



Gambar 4 Ilustrasi *Śāḍgunya*

Sumber: Konstruksi Peneliti dari Pemikiran LN Rangarajan, “*The Arthashastra*”, 2018

Untuk menjalankan keenam kebijakan ini terdapat empat cara atau jalan (*catur upaya*) yang umumnya ditempuh dalam diplomasi menurut Chanakya. Ilustrasi mengenai Catur Upaya dapat dilihat pada Gambar 5 dibawah ini.



Gambar 5 Ilustrasi Catur Upaya

Sumber: <https://www.quora.com/>, 2015

Catur Upaya merupakan empat pendekatan atau cara untuk mencapai tujuan nasional atau bisa dikategorikan sebagai empat metode diplomasi sebuah negara. *Catur upaya* terdiri dari empat bagian berbeda. Pertama, *sama* (*conciliation*) perdamaian, konsiliasi atau penyesuaian. Kedua, *dama* (*gift*) pemberian, kado atau hadiah. Ketiga, *bedha* (*rupture*) perpecahan atau perselisihan. Dan keempat adalah *danda* (*force*) kekerasan, atau pemaksaan.

Arthashastra karya Chanakya sesungguhnya memberikan penekanan yang lebih kepada peranan diplomasi namun tidak memberikan preferensi atas perang. Diplomasi bagi Chanakya dijalankan untuk mencapai beberapa hal seperti menarik sekutu, menunda perang jika sebuah negara itu lemah dan mudah diserang dan untuk membuat *post war arrangements for a new order*. Hubungan

¹² Kautilya Arthashastra 7.13. 42-44: 366

antar negara dibangun dan dibawa oleh *Duta* atau *Ambassadors*.

Baik diplomasi maupun perang keduanya dijalankan oleh Chanakya dengan tujuan untuk memperoleh *power* yang lebih besar bagi negaranya. Namun yang kemudian perlu dicermati adalah penekanan Chanakya bahwa *power* bukanlah tujuan akhir yang harus dicapai oleh negara. Justru *power* adalah alat yang digunakan untuk mencapai kepentingan yang lebih besar, yaitu *yogaksema* atau

kebahagiaan, kesejahteraan dan keamanan rakyat.

Konsep Pemetaan Ancaman dalam Arthashastra sebagai Dasar Strategi Diplomasi Pertahanan

Pemetaan ancaman dalam konsep Western dan juga konsep menurut Chanakya dalam Arthashastra tidaklah jauh berbeda. Perbandingan keduanya dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Perbandingan antara Konsep Pemetaan Ancaman Western dan Menurut Chanakya dalam Arthashastra

Variable	Western concept	Chanakya dalam Arthashastra
Sumber ancaman	<p><i>The Orign of Threat:</i></p> <p>Konsep tradisional: Ancaman datang dari negara asing (luar negara) Konsep non-tradisional: Ancaman datang dari lingkungan domestik (dalam negeri) dan internasional (luar negeri)</p>	<p><i>Vyasana</i> : Malapetaka/ ancaman/ bencana. ancaman domestik: dari dalam negara seperti: pemberintakan, dekadensi penguasa, wabah penyakit, kelaparan pemberontakan, korupsi bencana alam dan kejahatan domestic. Bencana dari luar negara: invasi/ serangan negara lain, infiltrasi agen asing kedalam negara, sekutu yang membelot</p>
Sifat Ancaman	<p>Tradisional: ancaman bersifat militeristik, pendekatan terhadap ancaman mengutamakan peran militer atau penggunaan kekerasan</p> <p>Non-tradisional: ancaman bersifat kompleks, gabungan antara ancaman berdifat militeristik</p>	<p>Tradisional: ancaman bersifat militeristik, pendekatan terhadap ancaman mengutamakan peran militer.</p>

	dan juga ancaman terkait dengan ilpoleksosbudhankam,	
Aktor	Negara dan non negara (kelompok teroris, bandar narkoba, Transnational Organized Crime, dll)	Aktor negara beserta angkatan bersenjata dan intelejen negara)
Paradigma	Konstruktivis,	Realis
Pemetaan ancaman dari luar negara	Analisa SWOT, Geostrategi, Negara berkompetisi dan atau bekerjasama atas suatu isu	Teori Mandala, Konstelasi geopolitik, negara selalu bersiap melakukan penaklukan atau bersiap menghadapi upaya penaklukan dari negara lain

Sumber: Konstruksi Penulis dari berbagai sumber, 2018.

Merujuk pada tabel 1 mengenai perbandingan konsep pemetaan ancaman *western* dan berdasarkan pandangan Chanakya dalam karyanya, Arthashastra, maka terlihat jelas bahwa sesungguhnya pemetaan ancaman secara tradisional telah dipaparkan dalam arthashastra yang dibuat pada 350-283 SM. Konsep arthashastra dalam pemetaan ancaman ini masih merujuk pada *nature and origin of threat* yang bersifat tradisional (militaristik). Hal ini dapat dimengerti karena paradigma yang berkembang saat itu adalah realisme dan ancaman belum terproliferasi lebih kompleks seperti jaman modern. Terlepas dari hal tersebut, Chanakya sudah meletakkan nilai-nilai dasar terkait ancaman yang non-tradisional pada terminologi *vyasana* yang berasal dari dalam negara seperti bencana

alam, kelaparan, dekadensi penguasa, wabah penyakit, dll.

Chanakya memberikan penekanan yang cukup serius bagi ancaman eksternal. Dengan demikian untuk mencegah ancaman yang berasal dari luar negara tersebut Chanakya menjabarkan teori mengenai *Mandala/circle of state*. Di mana sang *Vijigīṣu* memetakan negara mana yang menjadi musuh alamiahnya, musuh potensialnya, dan juga sekutu yang dapat membantunya. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan bahwa negara tetangga merupakan musuh alami, di mana ancaman terkait gesekan perbatasan dan kemungkinan untuk penyerangan terhadap sang *Vijigīṣu* jauh lebih tinggi. Untuk memahami penetapan teori ini, secara hermeneutik kita perlu menggunakan pemikiran hermeneutika

Hans-Georg Gadamer (dalam Susanto, 2016) yakni teori kesadaran (*Historically Effected Consciousness*) di mana pemahaman seorang penafsir ternyata dipengaruhi oleh situasi hermeneutik tertentu yang melingkupinya, baik itu tradisi, kultur, maupun pengalaman hidupnya.¹³

Penetapan teori *Mandala* ini merujuk pada keadaan dunia saat itu pada abad ke 4 SM. Saat itu situasi kerajaan Maurya bersifat *land-base*, di mana negara-negara tetangganya berbatasan secara darat sehingga mobilisasi pasukan dari satu negara untuk menyerang negara lain jauh lebih mudah jika dibandingkan dengan negara yang dipisahkan oleh lautan. Selain itu, sistem internasional saat itu juga belum mengenal penghormatan atas kedaulatan negara.¹⁴ Hal tersebut membuat satu negara dapat menyerang negara lain disebelahnya untuk memperluas wilayah, menambah sumber daya alam dan pendapatan melalui pajak atau upeti dari negara yang telah ditaklukkan. Keadaan ini kemudian menjadi salah satu alasan mengapa negara yang bertetangga secara langsung adalah musuh alami karena mereka-lah yang paling mungkin melakukan penyerangan

terhadap wilayah kekuasaan sang *vijigīṣu*. Maka dari itu, bagi Chanakya negara tetangga (yang menunjukkan sikap bermusuhan/ selalu berselisih) adalah entitas politik yang paling perlu diwaspadai.

Namun kemudian yang perlu digaris-bawahi adalah bukan dengan serta merta menjadikan negara tetangga menjadi musuh sungguhan. Sebagaimana Chanakya kemudian melanjutkan penjelasannya bahwa tidak semua negara yang bertangga menjadi musuh. Posisi tersebut tergantung dari bagaimana sikap mereka (kebijakan yang diambil, respon terhadap isu yang berkembang) terhadap sang *Vijigīṣu* lah yang menentukan apakah mereka akan menjadi musuh (*aribhavin*) atau kawan (*mitrabhavin*). Keadaan ini yang membuat negara kemudian bisa membentuk konstelasi mandala yang saling-tumpang-tindih dengan negara tetangga dan negara lainnya berdasarkan isu, kebijakan ataupun kepentingan yang sedang diperjuangkan oleh negara tersebut.

Jika kemudian diarahkan terhadap pemetaan ancaman yang dilakukan oleh Indonesia, maka dapat terlihat bahwa Indonesia juga mengantisipasi ancaman

¹³ Edi Susanto, *op.cit.* hlm 52

¹⁴ Sebagaimana diatur dalam traktat Westphalia

yang paling potensial muncul dari negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Hal yang perlu dicermati kemudian adalah cara Indonesia untuk “menghadapi” negara-negara tetangganya dalam konstelasi geopolitik (ASEAN, Australia dan juga Pasifik). Upaya yang dilakukan Indonesia dapat dipandang sebagai bentuk penggalangan kekuatan, di mana kompetitor potensial (negara tetangga) digalang dan dikondisikan agar tidak melakukan serangan terhadap Indonesia. Pembuatan pakta-pakta kerjasama dan upaya memunculkan *common interest* dengan negara tetangga ini dapat dilihat sebagai upaya pencegahan agar negara tetangga tidak melakukan serangan terhadap Indonesia, karena mereka juga memiliki kepentingan di Indonesia dan dengan melakukan serangan tidak hanya akan menimbulkan kerugian pada Indonesia semata, namun juga kerugian di pihak mereka.

Jika dihadapkan dengan pandangan dalam Arthashastra terkait posisi negara yang bertetangga pada konstelasi teori mandala, sesungguhnya Indonesia telah menetapkan konstelasi mandala yang unik. Hal ini bukan hanya karena Indonesia berupaya menempatkan negara-negara tetangganya pada posisi *mitrabhavin*

(bersahabat) bukan *aribhavin* (bermusuhan). Namun juga karena jargon politik luar negeri *Zero Enemy Thousand Friends* secara tidak langsung telah meniadakan posisi “musuh” dalam konstelasi geopolitik mandala Indonesia.

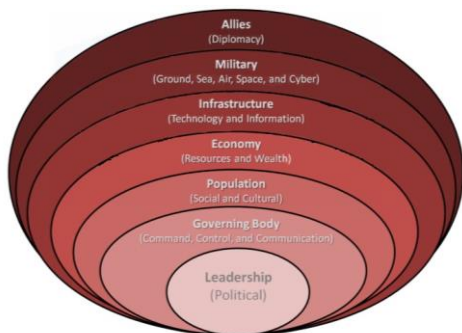
Hal yang perlu dikritisi dari pola penetapan ancaman pada Arthashastra adalah keberadaan ancaman yang terlalu menitik-beratkan pada sifat-sifat ancaman yang militeristik, sehingga hanya terkooptasi pada ancaman yang bersifat tradisional semata. Sifat atau *nature* ancaman yang bersifat *military oriented* ini tentu akan sedikit berselisih dengan pemahaman modern di mana *nature* ancaman sudah semakin kompleks.

Namun terlepas dari hal itu, konsep Mandala sesungguhnya sangat dapat dijadikan dasar strategi pada diplomasi pertahanan. Konstelasi geopolitik negara dalam teori mandala mengharuskan sebuah negara mengidentifikasi mana negara yang dapat menjadi musuh alami, musuh potensial, sekutu dekat, ataupun sekutu jauh. Negara mana yang dapat memenuhi syarat sebagai *mitra* (rekan kerja/sekutu), negara mana yang berpotensi untuk berselisih pendapat dalam sebuah isu. Dengan demikian negara dapat melihat secara holistik negara mana yang perlu di-lobby lebih

keras karena posisinya akan bersebrangan dan negara mana yang sudah bisa dipastikan akan berada dipihaknya. Mandala ini membuat negara melihat peta kekuatan geopolitiknya dalam memenangkan sebuah isu yang berkaitan dengan upaya mencapai kepentingan nasional negaranya.

Konsep Tata pemerintahan dalam Arthashastra sebagai Dasar Strategi Diplomasi Pertahanan

Teori *Saptanga* dalam Arthashastra menjelaskan bahwa terdapat tujuh elemen yang diperlukan oleh negara untuk menjadi negara yang kuat. Menurut Vinay Vittal (2011) sebagian besar elemen ini masih relevan hingga saat ini, namun ada satu elemen yang perlu diinterpretasikan kembali seiring dengan perkembangan zaman, dan teknologi, yakni *Durga* atau ibu kota yang dibentengi. Vittal menglistrasikan pemahaman kembali terhadap teori saptanga pada gambar:



Gambar 6. Ilustrasi Saptanga menurut Vittal
Sumber: Vittal 2011

Seiring dengan kemajuan teknologi, maka yang perlu dicermati dari pemaknaan ketujuh elemen ini adalah fokus mereka terhadap hal-hal baru yang muncul bersamaan dengan perkembangan teknologi informasi, seperti misalnya pemaknaan pada ibukota yang dibentengi. Pada zaman kerajaan, pusat data dan pemerintahan berada di ibukota sehingga keberadaan benteng menjadi sangat krusial sebagai bagian dari pertahanan. Namun konteks zaman sekarang benteng yang diperlukan tidak hanya berbentuk fisik lagi, terlebih karena keberadaan data-data negara dengan adanya teknologi digital, tidak lagi hanya disimpan dalam bentuk fisik (data di atas kertas) saja, namun juga dalam bentuk data digital. Data-data digital inilah yang kemudian perlu dijadikan *concern* oleh pemerintah pula. Karena tidak dapat dipungkiri kejahatan siber (pencurian data-data pemerintah, penyalahgunaan data masyarakat, *hacking*, *malware*, virus, dll) kian hari menjadi sebuah ancaman yang nyata dihadapi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Benteng siber untuk menjamin kerahasiaan data dan sistem keamanan teknologi digital serta informasi negara menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak untuk segera dibentuk dan dijalankan.

Menurut Abhisek Kumar (2003: 68) Teori Saptanga, atau elemen pembentuk negara ini sesungguhnya memiliki kesamaan dengan konsep kontemporer

mengenai dimensi internal dari kekuasaan nasional (sebagaimana terlihat pada tabel 2 tentang Perbandingan teori statecraft).

Tabel 2 Perbandingan Teori Statecraft Dan Kekuatan Nasional Menurut Pandangan Chanakya Dalam Arthasahstra Dengan Konsep Barat

Prakrti atau elemen pembentuk negara berdasarkan teori <i>saptanga</i>	Elemen pembentuk negara menurut Chanakya dalam perspektif negara modern	Model kekuatan nasional berdasarkan Teori Transisi Kekuatan	Model kekuatan nasional berdasarkan Tellis <i>et al</i>
<i>Swami</i> – Pemimpin negara	Kepemimpinan Politik	Kemampuan politik (dampak jangka pendek pada perubahan kekuatan nasional)	Sumber daya nasional : -Teknologi -Perusahaan -Sumber daya manusia -Sumber daya modal/ keuangan -Sumber daya fisik
<i>Amatya</i> – Dewan Menteri atau pejabat negara	Legislative dan birokrasi		
<i>Janapada</i> – wilayah dan populasi	Sumber daya nasional	Produktivitas ekonomi penduduk (dampak jangka menengah pada perubahan kekuatan nasional)	Kinerja Nasional -Kendala Eksternal -Kapasitas infrastruktur -Sumber daya ideasional
<i>Durga</i> – kota yang dibentengi	Pertahanan negara dan sumber daya perkotaan		
<i>Kosha</i> – Perbendaharaan	Sumber daya ekonomi		
<i>Danda</i> – angkatan bersenjata	Militer	Populasi (dampak jangka panjang pada perubahan kekuatan nasional)	Kapabilitas Nasional -Sumber daya strategi dan kemampuan konversi = kemampuan tempur
<i>Mitra</i> – Sekutu	Sekutu		

Sumber: Kumar, Abhisek (2003)

Jika kita berupaya melihat persamaan dari tabel ini, baik model yang digambarkan oleh Chanakya ataupun model dari Tellis *et al*, keduanya mendiskusikan bahwa sumber daya nasional dan juga kemampuan militer menjadi kontributor utama kekuatan nasional.

Ketiga model ini melihat keterkaitan antara berbagai elemen pembentuk negara.

Bentuk *statecraft* dalam pandangan Chanakya terlihat tidak jauh berbeda jika disandingkan dengan konsep trias politika. Dalam trias politika kekuasaan dipisahkan kedalam tiga lembaga berbeda, yakni kekuasaan legislatif, eksekutif dan juga

yudikatif¹⁵. Bentuk trias politika ini tercermin dalam pustaka Arthashastra karya Chanakya. Kekuasaan legislative merujuk pada elemen *amatya* atau para Menteri yang memberikan nasehat dan membantu terkait pengaturan negara. Kekuasaan eksekutif merujuk pada elemen *swami* atau pemimpin negara. Sedangkan kekuasaan yudikatif dijalankan berdasarkan empat dasar hukum berupa *dharma* (*established law* atau hukum yang berlaku), *Charita* (*customary law* atau hukum adat), *Rajasasana* (*edicts, announced law* atau maklumat, hukum yang diumumkan, bisa berbentuk titah raja), *vyavahara* (*evidence, conduct* atau kesaksian, perilaku).¹⁶ Praktik penegakkan hukum ini dijalankan oleh setiap pengadilan dengan tiga *Pradeshtri* (*magistrate* atau hakim setingkat menteri).¹⁷

Saptanga teori yang dikemukakan oleh Chanakya ini dapat menjadi sebuah bagian integral yang penting dalam strategi diplomasi pertahanan. Hal ini disebabkan karena elemen dalam *saptanga* dapat terukur secara agregat sebagai sebuah kekuatan negara. Maka dari itu, hal ini tentu dapat dijadikan alat teoretis yang baik untuk analisis intelijen

yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai lawan ataupun kawan yang akan diajak bekerja sama dalam kerangka diplomasi pertahanan sebuah negara.

Analisis Konsep Diplomasi Pertahanan dalam Arthashastra sebagai Dasar Strategi Diplomasi Pertahanan

Diplomasi dalam pandangan Chanakya merupakan bagian dari strategi besar mempertahankan eksistensi dari negara. Penekanan mengenai diplomasi dalam pandangan Chanakya berada pada beberapa konsep besar seperti *mantrashakti* (*power* negara yang digunakan untuk mempengaruhi negara lain dan termasuk diplomasi di dalamnya); *śāḍḡṇya*, enam kebijakan luar negeri yang digunakan secara paralel dengan teori *mandala* dan juga hasil penilaian dari *saptanga* sebuah negara; dan *catur upaya* atau empat cara yang digunakan secara umum dalam melaksanakan diplomasi antar negara.

Dalam menghadapi keadaan internasional yang anarki Chanakya menitik beratkan pada pelaksanaan *śāḍḡṇya* dan *catur upaya*. Jika kita bandingkan dan analisis antara *śāḍḡṇya*

¹⁵ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008) hlm.53


¹⁶ Arthashastra, 3.1. 39-40

¹⁷ Arthashastra 3.1.1

dengan *contemporary instrument of power* yakni DIME (*Diplomacy, Information, Military and Economy*) sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3 tentang Perbandingan DIME, *Śāḍgunya* dan *Power Option*, maka dapat terlihat bahwa sebagian besar kebijakan dalam *śāḍgunya* terletak pada domain dipomasi. Hal ini sesungguhnya berkorelasi dengan

analisis dari Chanakya bahwa untuk menilai kekuatan relatif antar negara kekuatan intelektual sebuah bangsa (kekuatan nasihat dan diplomasi) atau *mantrashakti* itu jauh lebih penting daripada kekuatan militer (*prabhava-shakti*) ataupun kepemimpinan (*utsaha-shakti*).

Tabel 3 Perbandingan DIME, *Śāḍgunya* dan *Power Option*

Instrument Power kontemporer	Enam kebijakan Luar negeri Chanakya <i>Śāḍgunya</i>	Jenis Perang menurut Chanakya	Peperangan sebagai <i>hard power</i>
Diplomasi	<ul style="list-style-type: none"> - Sandhi – Membuat Perdamaian - Dvaidibhava – Kebijakan Ganda - Samsraya – mencari perlindungan - Asana – Netral 	<ul style="list-style-type: none"> - Perang Rahasia menggunakan langkah-langkah penghianatan dan psikologis 	 <p>Intensitas yang lebih rendah</p> <p>Intensitas yang lebih tinggi</p>
Informasi		<ul style="list-style-type: none"> - Perang diplomatic menggunakan langkah-langkah diplomatic offensive 	
Militer	<ul style="list-style-type: none"> - Yana – Bersiap untuk perang - Viragaha – Perang 	<ul style="list-style-type: none"> - Perang yang tidak di deklarasikan, menggunakan metode kladestin, pembunuhan rahasia dan gen rahasia - Perang terbuka pada waktu dan tempat yang ditentukan 	
Ekonomi			

Sumber: Kumar, Abhishek (2016)

Dari tabel 3 di atas dapat terlihat bahwa *śāḍgunya* menekankan lebih banyak pada diplomasi ketimbang militer dalam DIME. Namun bukan berarti dua

bagian lainnya tidak mendapatkan perhatian penting. *Information* dalam Arthashastra menjadi bagian yang seolah berdiri sendiri dalam kerangka kerja

intelijen. Namun hasil *assesment* intelijen dalam bentuk telik-sandi dan informasi rahasia menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang akan diambil dalam range *śāḍgunya*. Menurut Chanakya, perekonomian merupakan elemen kekuatan negara yang penting bagi negara. Posisi perekonomian sama penting dengan porsi militer, bahkan dalam beberapa kasus perekonomian jauh lebih penting daripada militer itu sendiri.

Konsep *Mantrashakti* dapat menjadi paradigma dasar dalam diplomasi pertahanan di mana diplomasi diletakkan sebagai salah satu kekuatan terpenting yang harus dimiliki secara mumpuni oleh sebuah negara. Diplomasi digunakan sebagai *first line* dan *last line of defense* yang diejawantahkan dalam kebijakan luar negeri terhadap negara-negara yang ada dalam perpolitikan internasional. *Samdhi*, *dvaiddibhava*, *samsraya*, dan *asana* digunakan sebagai *first line* (upaya *preventive*) untuk menggalang kekuatan dan memastikan negara lain tidak menyerang/bersebrangan negara yang *vijigīṣu*. Sementara *Samdhi* dan *samsraya* dapat digunakan sebagai *last defense* ketika perang tidak dapat dielakkan dan kedamaian diupayakan untuk mengurangi efek destruktif dari perang terhadap masyarakatnya. Dalam melaksanakan

poin-poin *Śāḍgunya* ini *catur upaya* di jalankan melalui *sama*, *dama*, *bedha*, dan *danda*.

Korelasi Konsep Diplomasi pertahanan dalam Pandangan Chanakya Arthashastra dan Praktik Diplomasi Pertahanan Negara Republik Indonesia

Diplomasi pertahanan dalam pandangan Chanakya Arthashastra dapat dijabarkan dalam kerangka sebagai berikut. Diplomasi menurut Chanakya dalam Arthashastra disebut sebagai *Mantrashakti*. Diplomasi sebuah negara dipengaruhi oleh dua hal besar. Pertama adalah konsep pemetaan ancaman, utamanya ancaman eksternal yaitu teori *mandala/circle of state*. Kedua adalah hasil penilaian atau *assesment* dari tujuh elemen yang membentuk sebuah negara/teori *saptanga*. Dalam menjalankan diplomasi ini maka terdapat enam kebijakan luar negeri/ *śāḍgunya* yang diaplikasikan dengan memperhitungkan teori *mandala* dan juga teori *saptanga*. Adapun aktor utama yang terlibat dalam *śāḍgunya* ini antara lain pemimpin negara/raja, pimpinan angkatan bersenjata, dan diplomat (yang juga berperan ganda sebagai agen intelijen negara).

Dari *śāḍgunya* ini kemudian strategi diplomasi pertahanan yang diinginkan untuk dijalankan dengan sebuah negara dimunculkan. Adapun bentuk kegiatannya antara lain: *join march*¹⁸, *join excersise*¹⁹, pembelian alutsista, pelatihan prajurit, dan pembuatan pakta pertahanan²⁰. Kemudian cara-cara dalam menjalankan diplomasi pertahanan ini dilaksanakan menggunakan *catur upaya*, yaitu *sama*, *dama*, *bedha* dan *danda*.

Karena dijiwai oleh pemikiran realis diplomasi pertahanan yang dijalankan berdasar pandangan Chanakya dalam Arthashastra berujung pada terciptanya *prabhava shakti* atau yang pada ilmu hubungan internasional modern dikenal sebagai *effect deterrence* atau efek daya tangkal. *Prabhava shakti* sebagai bentuk *power* bukanlah akhir yang ingin dicapai oleh Chanakya. Kepemilikan *prabhava shakti* ini ditujukan untuk mewujudkan *yogakshema* atau kesejahteraan, kebahagiaan, keamanan dan kemakmuran rakyat sebuah negara

Konstruksi diplomasi pertahanan negara berdasarkan pandangan Chanakya

dalam Pustaka Arthashastra berada pada lingkup paradigma realisme. Paradigma diplomasi pertahanan menurut Chanakya terlalu militeristik karena nature ancaman saat itu masih tradisional. Maka dari itu kemudian sistem pertahanan negara dan reaksi terhadap penanggulangan ancaman yang menimpa negara masih bersifat tradisional (militeristik). Dengan demikian ketika hendak mengaplikasikan paradigma ini ke masa sekarang diperlukan pendekatan yang lebih holistic. Pendekatan holistik ini tidak hanya melibatkan unsur militer dalam pertahanan negara, baik dalam pemetaan dan penaggulangan ancaman, diplomasi, termasuk di dalamnya pada pembuatan strategi dan kebijakan pertahanan.

Jika dianalisa lebih jauh sesungguhnya kerangka kerja diplomasi pertahanan menurut pandangan Chanakya tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan diplomasi militer Indonesia yang merupakan bagian dari diplomasi pertahanan Indonesia. Hal ini disebabkan karena memang diplomasi pertahanan dalam kerangka Chanakya

¹⁸ *Join march* merujuk pada keadaan di mana sang vijigisu bersama sekutunya melakukan *march* bersama untuk melawan negara musuh

¹⁹ Merujuk pada keadaan di mana sang vijigisu bersama negara mitra/ sekutu melakukan latihan bersama baik dengan latihan perang bersama ataupun latihan strategi bersama

²⁰ Pakta pertahanan bisa dibuat dengan mitra ataupun musuh. kerajaan Maurya dibawah pemerintahan Chandragupta tercatat pernah membuat pakta pertahanan dengan Seloucos Nicator (Penguasa Yunani di Asia Barat)

merupakan kerangka yang *military heavy* dan berfokus pada ancaman yang masih bersifat tradisional.

Sementara itu, berdasarkan hasil analisis penulis dapat ditemukan bahwa terdapat perbedaan antara praktik

diplomasi pertahanan dalam pandangan Chanakya arthashastra dengan praktik diplomasi pertahanan modern yang berlaku saat ini, sebagaimana dijabarkan dalam Tabel 4 dibawah ini

Tabel 4 Perbandingan Konsep Diplomasi Pertahanan

Variabel	Diplomasi Pertahanan menurut Chanakya Arthashastra	Diplomasi Pertahanan Modern
Aktor	Negara (Raja, Angkatan Bersenjata, Diplomat, Intelejen)	1. Negara (Pemimpin Negara, kementerian/ Lembaga militer dan non militer, angkatan bersenjata) 2. Non Negara (Industri pertahanan / bisnis Pertahanan)
Nature	Militeristik	Hybrid (militer dan non militer)
Platform kerjasama	Antar negara saja / government to government	1. Government to Government, 2. Government to Bussiness, 3. Bussiness to Bussiness (dibawah pengawasan negara)
Paradigma	Realis	Neo-realis, Konstruktivisme
<i>Interstate relation</i>	Konflikual; saling curiga; negara tetangga merupakan musuh alami dan potensial, namun derajat hubungan tergantung dari sikap dan reson negara tetangga terhadap negara yang bersangkutan (<i>vijigisu</i>)	Sebagian besar menganut paham regionalisme; kerjasama untuk mewujudkan kepentingan bersama (common interest)
Bentuk kegiatan	<i>Join March; join exercise; Developing defense</i> (Alutsista dan SDM); pakta perdamaian	Pertukaran perwira, latihan bersama, patrol bersama, kerjasama industri pertahanan, pengiriman pasukan perdamaian.
Tujuan diadakan Diplomasi Pertahanan	Prabhava shakti, terbentuknya <i>deterrence effect</i> negara yang kuat sehingga negara bisa mencapai <i>yogakshema</i> (keamanan, kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat)	Terbentuknya <i>Confidence Building Measure</i> (CBM), rasa saling percaya antar negara, sehingga negara bisa mencapai kepentingan nasionalnya sekaligus dengan terciptanya keamanan bersama di region

Sumber: Konstruksi Penulis dari berbagai sumber, 2018

Jika ditelaah lebih jauh, sesungguhnya konsep-konsep Arthashastra berdasar-kan pandangan Chanakya dapat dijadikan bahan kajian dalam upaya membangun strategi diplomasi pertahanan Indonesia. Konsep *Mantrashakti* dapat diadopsi dan dikembangkan dalam pola Diplomasi Pertahanan Indonesia. Untuk hal ini, Indonesia memerlukan *patern* mendidik

putra-putri bangsa yang memiliki keunggulan pada bidang *Soft Power Diplomacy*. Selain itu, konsep utama dalam pertahanan dan kenegaraan, *satya* dan *virya*, dapat dibangun guna membangun kekuatan di Indonesia. India mengajarkan konsep *satya* yakni kesetiaan, kepatuhan yang tinggi terhadap negara termasuk pimpinan negara.

Jika di telaah lebih jauh, saat ini Indonesia sesungguhnya telah memainkan konsep mandala dengan konstelasi geopolitik mitra-mitra. Sebuah konstelasi geopolitik dimana Indonesia berupaya merangkul negara-negara yang bertetangga langsung dan juga major power sebagai mitra dalam kerjasama, baik dalam hal pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial-budaya dan lain sebagainya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ryamizard Ryacudu menyatakan bahwa Indonesia melalui kemhan, saat ini mengadopsi Diplomasi Pertahanan Empat Poros²¹.

Diplomasi pertahanan empat poros ini merujuk pada upaya diplomasi pertahanan Indonesia untuk menjaga keseimbangan hubungan antara Amerika Serikat, Rusia, China dan juga ASEAN. Hubungan kerjasama ini dipandang sebagai hal yang sangat strategis seiring dengan meningkatnya kesamaan cara pandang di dalam upaya mewujudkan *Mutual National Interest* di tengah kompleksitas dinamika lingkungan strategis di kawasan Asia-Pasifik saat ini.

Melalui diplomasi empat poros ini, Indonesia berharap akan tercipta persatuan dan kerjasama yang kuat antar

negara dan antar kawasan sehingga cita-cita mulia bersama, yaitu terwujudnya dunia yang lebih aman, damai dan sejahtera. Cita-cita tersebut merupakan esensi dan titik nol arah kompas yang harus selalu di kalibrasi, disesuaikan dengan keadaan situasi serta kondisi actual dari lingkungan strategis kawasan.

Demikian pula, teori enam cara mendekati tetangga harus dikaji untuk membangun kekuatan politis tersendiri bagi Indonesia. Indonesia harus membangun sistemnya sendiri, namun dapat menjadikan sejumlah teori kuno sebagai pijakan dan inspirasi dan diterjemahkan ke dalam Bahasa dan konteks kekinian. Indonesia harus ramah, tetapi tidak boleh lengah.

Secara teoretis konsep strategi diplomasi pertahanan Indonesia terlihat lebih komprehensif jika dibandingkan dengan konsep diplomasi pertahanan menurut pandangan Chanakya dalam Arthashastra. Hal ini terlihat dari pelibatan unsur-unsur nir-militer berupa kementerian/ lembaga terkait (non-pertahanan) dalam perumusan maupun eksekusi kebijakan diplomasi pertahanan. Ini merupakan sebuah langkah maju yang

²¹ Kuliah Umum Menteri Pertahanan Republik Indonesia di hadapan Civitas Akademika

Universitas Pertahanan, Auditorium Universitas Pertahanan, Sentul, tanggal 19 September 2018.

signifikan dalam menghadapi proliferasi ancaman pada masa globalisasi saat ini.

Namun yang perlu menjadi catatan adalah kerangka *military heavy* yang dimiliki oleh Chanakya dalam Arthashastra ini alangkah baiknya juga menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan maupun strategi diplomasi pertahanan kedepannya. Penguatan kapasitas dan kapabilitas militer Indonesia (alutsista, SDM, maupun teknologi), harus diberikan porsi yang lebih banyak. Dalam hal ini ketersediaan dana untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas militer selayaknya menjadi catatan penting dalam APBN Indonesia kedepannya.

Kesimpulan

Arthashastra merupakan kompendium yang disusun oleh Acharya Chanakya pada akhir abad ke-4 SM. Risalah mengenai politik dan kesejahteraan ini telah meletakkan dasar-dasar nilai yang dapat dipergunakan sebagai sebuah grand strategi hingga masa kini. Sejumlah gagasan dalam Pustaka Arthashastra karya Chanakya dipandang masih relevan dengan aplikasi politik internasional saat ini. Konsep mengenai diplomasi pertahanan dalam Arthashastra diperoleh melalui analisa hermeneutik terhadap

beberapa gagasan-gagasan Chanakya, khususnya terkait pemetaan ancaman (*mandala* teori), *statecraft* (*saptanga* teori) dan juga teori diplomasi (teori *Mantrashakti*, *Śāḍgunya* dan *catur upaya*). Konsep Diplomasi Pertahanan dalam Pandangan Chanakya berada pada spektrum Paradigma realisme yang bersifat *military heavy*.

Pola Penetapan ancaman dalam Pustaka Arthashastra karya Chanakya menitik-beratkan pada sifat-sifat ancaman yang militeristik, sehingga hanya terkooptasi pada ancaman yang bersifat tradisional semata. Sifat ancaman yang tradisional inipun disikapi dengan cara-cara yang juga tradisional atau militeristik. Keadaan konsep pada Arthashastra karya Chanakya yang terlalu *militeristic oriented* inilah yang kemudian membuat konsep tersebut tidak bisa serta-merta diaplikasikan dalam strategi diplomasi pertahanan masa kini. Karena saat ini ancaman telah terproliferasi sedemikian luas. Ancaman tidak lagi bersifat tradisional/ militeristik semata, namun telah berkembang menjadi ancaman non-tradisional pula. Maka dari itu, ketika ingin mengaplikasikan pemikiran Chanakya yang terdapat dalam konsep-konsep di Pustaka Arthashastra saat ini, diperlukan penyesuaian-penyesuaian tertentu,

terutama terkait dengan strategi menghadapi ancaman non militer/ non tradisional.

Konsep Mandala sesungguhnya dapat dijadikan dasar strategi dalam melakukan diplomasi pertahanan. Konstelasi geopolitik negara dalam teori mandala mengharuskan sebuah negara mengidentifikasi mana negara yang dapat menjadi musuh alami, musuh potensial, sekutu dekat, ataupun sekutu jauh. Negara mana yang dapat memenuhi syarat sebagai *mitra* (rekan kerja/ sekutu), negara mana yang berpotensi untuk berselisih pendapat dalam sebuah isu. Dengan demikian negara dapat melihat secara holistik negara mana yang perlu di-*lobby* lebih keras karena posisinya akan bersebrangan dan negara mana yang sudah bisa dipastikan akan berada dipihaknya.

Konsep Tata Pemerintahan (*Statecraft*) dalam Pustaka Arthashastra karya Chanakya dijabarkan ke dalam seni dalam memaksimalkan kekuatan negara melalui tujuh elemen pembentuk negara (*saptanga*). Ketujuh elemen ini yakni *Swamin* (Pemimpin negara); *Amatya* (anggota dewan/mereka yang mewakili institusi negara); *Janapada* (sumber daya negara, termasuk wilayah dan penduduk); *Durg* (Ibukota yang dibentengi); *Kosa*

(Perbendaharaan); *Danda/Bala* (Angkatan bersenjata/ militer); dan *Mitra* (teman dan sekutu negara). Chanakya menggambarkan ketujuh elemen pembentuk negara itu sebagai eksposisi dari teori Mandala (*circle of state*) yang kemudian membentuk dasar dari kebijakan luar negeri di lingkungan yang didominasi oleh ekspansionisme teritori atau penaklukan teritori.

Sebagian besar elemen ini masih relevan hingga saat ini, namun ada satu elemen yang perlu diinterpretasikan kembali seiring dengan perkembangan zaman, dan teknologi. Pada zaman kerajaan, pusat data dan pemerintahan berada di ibukota, sehingga keberadaan benteng di ibukota menjadi sangat krusial sebagai bagian dari pertahanan. Namun konteks zaman sekarang benteng yang diperlukan bukanlah berbentuk fisik lagi, terlebih karena keberadaan data-data negara dengan adanya teknologi digital, tidak lagi hanya disimpan dalam bentuk fisik (data di atas kertas) saja, namun juga dalam bentuk data digital.

Saptanga teori yang dikemukakan oleh Chanakya ini dapat menjadi sebuah bagian integral yang penting dalam strategi diplomasi pertahanan. Hal ini disebabkan karena elemen dalam *saptanga* dapat terukur secara agregat

sebagai sebuah kekuatan negara. Dengan demikian hal ini tentu dapat dijadikan alat teoretis yang baik untuk analisis intelejen. Karena analisis intelejen sangatlah dibutuhkan untuk menghasilkan informasi yang lebih komprehensif. Utamanya mengenai kawan ataupun lawan yang akan diajak bekerjasama dalam kerangka diplomasi pertahanan negara

Konsep Diplomasi dalam Arthashastra karya Chanakya dijabarkan sebagai *Mantrashakti*, kekuatan yang dibangun di atas kecerdasan dan kekuatan narasi manusia termasuk perkataan dan tulisan. Dalam memperoleh *mantrashakti* ini Chanakya kemudian menetapkan enam kebijakan luar negeri (*Śāḍgunya*) dan empat upaya (*Catur Upaya*) untuk melancarkan diplomasi. *Śāḍgunya* teori ini merupakan enam kebijakan yang diterapkan oleh negara sesuai dengan keadaan lingkungan strategis dari negara tersebut terhadap negara-negara lain dalam lingkup percaturan politik internasional. Keenam kebijakan itu antara lain: *sam̐dhi*, *vigraha*, *asana*, *yana*, *samsraya* dan *dvaiddibhava*. Sementara jika terkait dengan aplikasi dan pendekatan dari diplomasi itu sendiri, Chanakya menjabarkannya ke dalam *Catur Upaya*, yaitu: *sama*, *dama*, *bedha*, *danda*.

Konsep Diplomasi menurut Pustaka Arthashastra karya Chanakya dijabarkan dalam konsep *Mantrashakti* sebagai kekuatan ucapan, narasi lisan maupun tulisan untuk mencapai tujuan negara. *Mantrashakti* menurut Pandangan Chanakya dalam Pustaka Arthashastra merupakan bagian integral dan paling penting dari kekuatan yang harus dimiliki negara. Konsep *Mantrashakti* dapat menjadi paradigma dasar dalam diplomasi pertahanan di mana diplomasi diletakkan sebagai salah satu kekuatan terpenting yang harus dimiliki secara mumpuni oleh sebuah negara. Diplomasi digunakan sebagai *first line* dan *last line of defense* yang di ejawantahkan dalam kebijakan luar negeri terhadap negara-negara yang ada dalam perpolitikan internasional. *Sam̐dhi*, *dvaiddibhava*, *samsraya*, dan *asana* digunakan sebagai *first line* (upaya *preventive*) untuk menggalang kekuatan dan memastikan negara lain tidak menyerang/ bersebrangan dengan negara sang *vijigīsu*. Sementara *Sam̐dhi* dan *samsraya* dapat digunakan sebagai *last defense* ketika perang tidak dapat dielakkan dan kedamaian diupayakan untuk mengurangi efek destruktif dari perang terhadap masyarakatnya. Dalam melaksanakan poin-poin *Śāḍgunya* ini,

catur upaya dijalankan melalui *sama, dama, bedha, dan danda*.

Sejumlah teori-teori klasik India, termasuk Chanakya Arthashastra relevan untuk dijadikan pijakan dan teori dasar dalam membangun pertahanan negara dan Diplomasi Pertahanan Indonesia. Konsep *mantrashakti*, *mayashakti* maupun teori politik *mandala* harus dipertimbangkan sebagai pijakan yang baik dalam membangun maupun memperkuat Pertahanan Negara Indonesia.

Konsep politik luar negeri bebas aktif, sejalan dengan konsep Veda yang berupa filsafat kewajiban moral untuk membangun masyarakat dunia, menjaga *bhumi* sebagai pertiwi yang suci bagi manusia. Dalam diplomasi Pertahanan, penggunaan konsep *mantrashakti* dan *mayashakti* semestinya menjadi penentu kemenangan Diplomasi Pertahanan Indonesia, walau untuk membangunnya tidak mudah dan memerlukan waktu.

Rekomendasi

Kepada Penstudi dan pemerhati Ilmu Pertahanan dan Hubungan Internasional, peneliti merekomendasikan agar dilakukan penelitian lebih lanjut tentang risalah Arthashastra guna memperkaya

keahlian Ilmu pertahanan non-western. Terkait dengan pola penetapan ancaman selayaknya Pemerintah dapat menerapkan nilai-nilai yang terdapat pada pandangan Chanakya dalam Arthashastra berupa kewaspadaan dan juga upaya untuk memperkuat kekuatan militer negara, seperti dengan meningkatkan rasio *military expenditure* dalam APBN.

Bagi para penstudi Diplomasi Pertahanan, pengkajian konsep Diplomasi Pertahanan dalam pandangan Chanakya pada Pustaka Arthashastra memberikan horizon baru non-western oriented, di mana selama ini, pendekatan yang digunakan banyak didominasi dalam kerangka western oriented. Penelitian ini dapat dijadikan pijakan awal guna melakukan penelitian lebih lanjut untuk benar-benar dapat diterapkan menjadi kajian keilmuan dalam Diplomasi Pertahanan. Terkait dengan konsep *statecraft* atau tata pemerintahan, Pemerintah Indonesia selayaknya dapat menjadikan nilai-nilai dalam konsep *saptanga* berupa upaya penguatan tujuh elemen negara (pemimpin negara; pemerintah/parlemen; wilayah dan populasi; infrastruktur dan teknologi; perekonomian dan perbendaharaan; militer dan angkatan bersenjata; dan teman/ aliansi/ mitra kerjasama) guna

mencapai kekuatan nasional yang komprehensif.

Bagi para Diplomat dan anggota parlemen yang bertugas dalam ranah hubungan luar negeri, pertahanan dan Diplomasi, penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan guna memperkaya berbagai strategi, metode maupun pengetahuan dalam pertahanan negara dan hubungan luar negeri. Pengetahuan ini menjadi sangat penting dalam membangun kekuatan wacana dan diplomasi (mantrashakti) dan kekuatan intelektual (intellectual investment), keluasan wawasan di mata internasional.

Daftar Pustaka

Buku

Col. Harjeet Singh, *The Military Strategy of The Arthashastra*, (New Delhi: Pentagon Press, 2012) hlm 32

Kautilya. 2003. *Arthasastra*, Surabaya: Paramita.

L.N.. Rangarajan. *The Arthashastra: Edited, Rearranged, Translated and Introduced*. New Delhi, India: Penguin Books India Ltd. 1992 hlm. 10

Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008) hlm.53

Pasal 1 Konvensi Montevideo dalam Lazarusli, Budi dan Syahmin A.K. 1986. *Sukses Negara dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Internasional*. Bandung: Remaja Karya. Hlm. 7

RP Kangle, *The Arthashastra Part II* (Delhi: Motilal Banardisass, 1992), hlm 318. Adhikarana 6. Bab 2. Sutra 13

Sukra, *Sukraniti*, (Mumbai: Khemraj Shrikrisnadass, 2012) chapter 1, sutra 62

Susanto, Edi. *Studi Hermeneutika: Kajian Pengantar*. Jakarta: Kencana

Jurnal

Amitav Acharya, "Dialogue and Discovery: In Search of International Relations Theories Beyond the West", *Millennium: Journal of International Studies*, Volume 39, Nomor 3, May 2011, hlm. 619-637

Mishra, Malay. 2017. "Unique Approach to Comprehensive National Power through the Lens of Kautilya's Arthashastra." *Journal of the United Service Institution of India*, Vol. CXLVII No. 607, January-March 2017

Satish Karad, "Perspective of Kautilya's Foreign Policy: An Ideal of State Affairs", *Modern Research Studies*. Volume 2. Nomor 2, June 2015. Hlm. 322-332

Website

<https://www.quora.com/What-is-the-Mandal-theory-of-Kautilya>

<http://www.defencestudies.co/2017/11/kautilyas-saptang-theory-of-state.html>

Sumber lain

Vinay Vittal, "Kautilya's Arthashastra: A Timeless Grand Strategy", *Tesis Magister*, (Alabama: School of Advanced Air and Space Studies Maxwell Airforce Base) 2011, hlm. 11.